

Relevansi Pemikiran dan Kesaksian Hidup Dietrich Bonhoeffer

Gereja dan Politik dalam sejarah Jerman 1933-2003

oleh Eckart Rein

Mungkin Anda akan bertanya: Apa alasan untuk membuat artikel dengan tema ini dalam sebuah Jurnal Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia? Bukan hanya sepuluh ribu kilometer lebih yang memisahkan bangsa Indonesia dan bangsa Jerman, namun juga tradisi-tradisi historis dan religius yang berbeda. Meskipun itu, saya ingin mencoba menggambarkan perkembangan sepanjang 70 tahun terakhir ini dalam hubungan antara gereja dan negara di Jerman. Selama per kunjungan-perkunjungan saya ke Indonesia, ketundukan dan kepasrahan terhadap rezim Soeharto yang diperlihatkan beberapa pemimpin gereja membuat saya teringat pada sikap uskup-uskup tertentu di Jerman pada masa rezim diktator Hitler. Sikap inilah yang ditolak dengan sangat berani oleh Dietrich Bonhoeffer. Itulah salah satu alasan mengapa pemikiran dan karya hidup Dietrich Bonhoeffer mendampingi saya dalam tinjauan historis-teologis ini.

Kegagalan - 1933-1945

Protestantisme sering ingin mengambil pedoman kehidupannya langsung dan terlalu harafia dari Alkitab, dan ini merupakan kekuatannya dan sekaligus kelemahannya. Dan Alkitab tidak serta merta menantang kita untuk bersikap kritis terhadap pemerintah dan kekuasaannya. Misalnya ketika orang-orang Farisi ingin menjerat Yesus, ia menjawab "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." (Mrk 12:13-17). Paulus mengingatkan bahwa "tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya" karena ia dan kekuasaannya menyandang pedang yang ditetapkan oleh Allah (Rom 13:1-6). Surat Paulus yang pertama kepada Timotius bahkan mengajak untuk berdoa syafaat untuk mereka yang berkuasa "agar kita dapat hidup tenang dan tenteram" (1 Tim 2:2). Sepertinya hal ini menunjuk jalan untuk orang Kristen Protestan supaya taat dan loyal terhadap tuntutan-tuntutan pemerintah, termasuk dinas militer. Teologi di Jerman tidak pernah mempertanyakan kewajiban seperti itu,

namun selain itu melalaikan untuk melibatkan diri secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengaturan tugas-tugas pemerintahan. "Tahta dan Altar" dalam sejarah Protestantisme merupakan ikatan di mana – sesuai sebuah kesalahpahaman yang lazim dalam ajaran Martin Luther tentang "Dua Kerajaan" – bidang duniawi dan bidang rohani harus terpisah dengan baik.

Baru melalui peristiwa-peristiwa abad ke-20 Protestantisme Jerman terpaksa untuk menghadapi masalah "Gereja dan Negara/Pemerintahan" ("Kirche und Staat"). Negara totaliter yang didirikan oleh rezim diktator Adolf Hitler sejak tahun 1933 menempatkan diri dan ideologinya sebagai satu-satunya ukuran untuk "baik dan jahat". Gambaran tentang kekuasaan negara yang dianugerahi dan taat kepada Allah disingkirkan oleh gambaran binatang yang mengejutkan dari dalam laut dalam kitab Wahyu 13. Penganiayaan aktivis-aktivis oposisi, diskriminasi dan pemusnahan orang-orang Yahudi serta orang-orang cacat pada awalnya hampir tidak ditentang oleh umat Kristen. Kritik diungkapkan hanya terhadap ideologi kelompok "Kristen Jerman"¹ atau jika gereja yang diserang. Kritik ini melahirkan gerakan "Bekennende Kirche" ("Gereja yang Mengaku") yang



Dietrich Bonhoeffer, 1904-1945, adalah salah satu tokoh utama "Gereja yang Mengaku". Sebagai dosen fakultas teologi Universitas Berlin, Guru di seminari vikaris di Finkenwalde dan wakil Oikumene, ia sangat dihargai di lingkungan gereja, namun juga sering dikritik dengan keras karena pandangannya yang "radikal". Pada tahun 1940 ia bergabung dengan sebuah kelompok perlawanan anti-Hitler di bawah Admiral Canaris, sebagai konsekuensi dari komitmennya. Karena alasan terduga pada tahun 1943 ia ditangkap dan ditahan di penjara di Berlin. Setelah kegagalan sebuah percobaan pembunuhan terhadap Adolf Hitler pada tgl. 20 Juli 1944, Bonhoeffer dinyatakan sebagai pejuang perlawanan. Tidak lama sebelum kapitulasi rezim Nazi dan berakhirnya Perang Dunia II,

Bonhoeffer dieksekusi (digantung) atas perintah dari instansi tertinggi pemerintah, di kamp konsentrasi Flossenbürg pada tgl. 9 April 1945. (Foto: Dietrich Bonhoeffer dalam penjara di Berlin, 1944)

pada tahun 1934 di kota Barmen/Jerman dalam *"Pernyataan Teologis Barmen"* menjauhkan diri dari pemerintahan dan sistem negara sosialis-nasional (Nazi) dan menyarankan untuk membangun sebuah gereja berposisi. Dalam "Tesis Barmen ke-5" ditolak "ajaran yang sesat bahwa negara, di luar tugas khas yang dimilikinya, dapat menjadi pengatur tunggal dan total kehidupan manusia".

Pada waktu perebutan dan pengambilan kekuasaan oleh Adolf Hitler, hanya sedikit orang Kristen yang menyadari apa yang akan dihadapi gereja. Salah seorang yang paling utama adalah Dietrich Bonhoeffer. Sejak pada tahun 1933 ia telah mengkritik dengan tajam "Prinsip Pemimpin" (*"Führerprinzip"*, ideologi nazi ketaatan buta terhadap Hitler), pemecatan orang-orang Yahudi dari pegawai negeri dan slogan-slogan pemerintah yang menghasut perang. Pada awalnya, Boenhoeffer

bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologia Berlin, namun setelah 1935 ia melatih vikaris-vikaris "Gereja yang Mengaku" (*"Bekennende Kirche"*). Ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1939, Bonhoeffer bergabung dengan gerakan perlawanan anti-Hitler dan pada tahun 1945 dieksekusi di sebuah kamp konsentrasi, setelah kegagalan sebuah percobaan pembunuhan terhadap Hitler. Perjalanan Bonhoeffer yang konsekwen dan rela menghadapi penderitaan ini yang meyakinkan tentang apa yang dituliskan pada tahun 1940 tentang kegagalan gereja di Jerman menghadapi brutalitas pemerintahan Hitler: "Gereja ... diam di mana seharusnya ia berteriak, karena darah orang-orang yang tidak berdosa berseru kepada Allah ... Gereja ikut menyaksikan terjadinya kekerasan dan ketidakadilan yang terselubung dalam nama Kristus ... Gereja menjadi berdosa terhadap kehidupan saudara-saudara Yesus yang paling lemah dan tak berdaya."

Kebangkitan 1945-1960

Titik tolak gereja protestan untuk berperan aktif dalam kehidupan publik pada masa pasca-perang di Jerman adalah pengalaman bahwa sikap yang

seolah-olah "netral terhadap masalah-masalah politik" dan keterlambatan dalam bertindak, juga dapat menjadi dosa dan kesalahan. Paling tidak itu yang dipelajari oleh gereja protestan di Jerman dari kegagalannya pada masa "Drittes Reich"². Oleh karena itu, wakil-wakilnya mengaku dalam "Stuttgarter Schuldbekentnis"³: "Kami mempersalahkan diri kami sendiri, bahwa kami tidak

mengaku dengan lebih berani, tidak berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, tidak percaya dengan lebih bersukacita dan tidak mengasihani dengan lebih berapi-api. Sekarang dalam gereja-gereja kami hendaknya permulaan baru dilakukan."

Peranan gereja-gereja pada masa pasca-perang di Jerman terutama dipengaruhi oleh keadaan Jerman yang sangat menyedihkan, penderitaan yang mendesak antara pengungsi-pengungsi, orang-

orang yang rumahnya dibom, tahanan-tahanan perang, serta kesadaran bahwa yang dituntut adalah permulaan baru secara total. Gereja-gereja dilihat sebagai satu-satunya lembaga yang relatif bertahan tanpa dihancurkan setelah rezim diktator Hitler, sehingga mereka dianggap sebagai pejamin pembangunan nilai-nilai baru dan konsolidasi aturan masyarakat. Mereka juga yang ikut bersama-sama lembaga-lembaga negara memperhatikan dan mengurus penderitaan masyarakat Jerman di masa pasca-perang. Dengan bantuan ekumenis dari luar negeri mereka mendirikan berbagai lembaga bantuan sosial. Melalui pelayanan pastoral dan pemberitaan Firman gereja-gereja mencoba mengelola penderitaan batin masyarakat dan memberi orientasi baru.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kedua gereja besar di Jerman (gereja Katolik dan persekutuan gereja-gereja Protestan) menjadi mitra negara yang saat itu masih dalam proses pembentukan sebagai negara demokrasi. Gereja-gereja juga diberikan beberapa privilese yang ditetapkan dalam beberapa perjanjian antara gereja dan negara yang berstatus undang-undang.

"Gereja baru menjadi gereja bila ia hadir bagi orang lain. Pertama-tama ia harus menyerahkan segala kekayaannya kepada mereka yang miskin. Pendeta harus hidup semata-mata berdasarkan persembahan sukarela jemaatnya, atau barangkali terlibat dalam satu panggilan sekular. Gereja harus ikut serta dalam masalah-masalah sekular dari kehidupan sehari-hari, bukan mendominasi, melainkan menolong dan melayani. Ia harus memberitahukan [kepada orang-orang] dari segala bidang tentang apa artinya hidup di dalam Kristus, hadir bagi orang lain. Khususnya, gereja kita sendiri harus turun ke lapangan untuk melawan segala kejahatan hubris, penyembahan kekuasaan, rasa iri, dan bualan, sebagai akar segala kejahatan. Gereja harus berbicara tentang hidup sederhana, kemurnian, kepercayaan (trust), kesetiaan, kesungguhan, kesabaran, disiplin, kerendahan hati, kepuasan dan menahan diri ... Saya berharap ini dapat menolong bagi masa depan gereja."

Dietrich Bonhoeffer 1944 dalam penjara di Berlin; dikutip sesuai penerjemahan dalam buku Norman E. Thomas: Teks-Teks Klasik tentang Misi dan Kekristenan Sedunia, BPK 1998, hlm 124

Misalnya gereja-gereja diakui statusnya sebagai lembaga publik (bukan swasta), mempunyai hak untuk menagih "pajak gereja" dari anggotanya melalui bantuan sistem pajak negara; pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah, pekerjaan sosial dan pastoral serta pengikutsertaan gereja dalam pembangunan bangsa diberi tempat yang terjamin. Namun di sisi lain, privilese-privilese seperti ini dapat juga berakibat mengancam kebebasan dan kemerdekaan gereja. Hal ini baru menjadi jelas ketika pada tahun-tahun berikutnya muncul berbagai pendapat-pendapat politik dan lembaga-lembaga yang bersaing. Orang Kristen di Jerman terpecah ke dalam dua golongan, yaitu mereka yang berpihak pada partai konservatif yang telah lama memerintah, CDU (Christlich Demokratische Union, Persatuan Kristen-Demokrat), dan mereka yang aktif mendukung politik sosial-demokrat (SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland) atau partai "hijau" (GRÜNE, partai ekologi-sosial). Dalam masyarakat sendiri terbentuk beberapa gerakan seperti serikat-serikat buruh, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan perhimpunan-perhimpunan korban pengusiran dari daerah-daerah Eropa Timur. Semua gerakan tersebut semakin berpengaruh dalam politik. Perubahan ini lama-kelamaan membuat gereja-gereja semakin mengembangkan kemandirian. Paling tidak ada kelompok-kelompok gereja yang mampu untuk bersikap secara kritis dan memerdekakan terhadap masalah-masalah politik, misalnya waktu "persenjataan kembali" Jerman (pembentukan kembali militer Jerman).

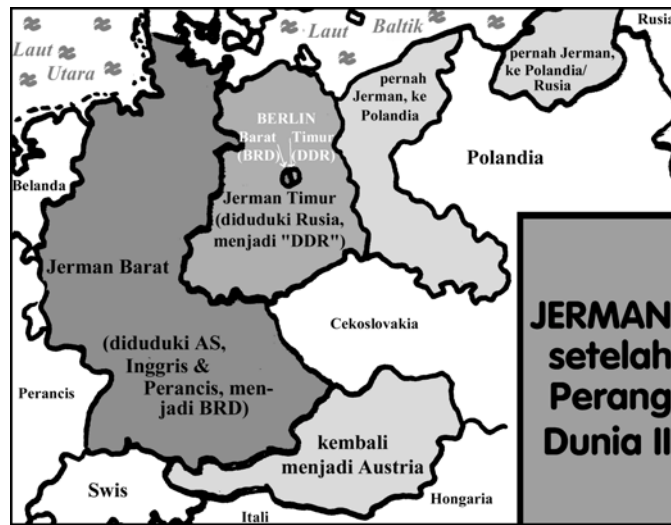
Bahaya bahwa setelah perang gereja-gereja akan melanjutkan sikap mereka yang tunduk pada kekuasaan, paling tidak sudah dikhawatirkan Dietrich Bonhoeffer. Pada tahun 1944 ia menulis dalam penjara sebuah rancangan, di dalamnya Bonhoeffer katakan: Gereja masa depan "harus berpartisipasi dalam tugas-tugas duniawi dalam kehidupan sosial manusia, bukan sebagai yang berkuasa, melainkan sebagai yang membantu dan melayani. Gereja harus mengatakan kepada orang-orang dari segala profesi apa artinya 'hidup di dalam Kristus' dan hadir bagi orang lain."

Tahan Uji – 1960-1990

Tahun-tahun 60-an terutama digunakan untuk pembangunan ekonomi dan konsolidasi politik Republik Serikat Jerman⁴. Keadaan khusus masa pasca-perang digantikan oleh proses normalisasi dalam masyarakat moderen dan sekuler. Menjadi semakin jelas bahwa status sebagai gereja-gereja mandiri yang dilindungi

undang-undang hanya akan tahan uji jika status tersebut tidak membatasi pembebasannya dalam memberitakan Firman dan melayani. Gereja-gereja tidak boleh dihambat untuk menyatakan sikap mereka sesuai dengan semangat Injil dalam menghadapi masalah kehidupan yang vital dan keputusan-keputusan politik. Gereja Protestan di Jerman⁵ melakukan hal ini terutama dalam bentuk memorandum ("*Denkschrift*", "pernyataan peringatan" tertulis). Salah satu kasus uji coba adalah apa yang disebut "Memorandum Timur" pada tahun 1965 di mana gereja menyatakan sikap terhadap keadaan orang-orang Jerman yang diusir dari wilayah timur⁶ dan sikap terhadap hubungan bangsa Jerman dengan negara-negara tetangga di sebelah Timur. Memorandum ini berani untuk menyentuh tema yang sangat sensitif, yaitu pelepasan wilayah-wilayah Timur. Pernyataan tersebut sangat membantu dalam klarifikasi di lingkungan gereja, namun menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan pemerintah yang konservatif. Dalam memorandum-memorandum berikutnya, misalnya tentang "Pengangguran", "Politik Pembangunan Negara-negara Berkembang", "Pelayanan Perdamaian", "Persaingan Persenjataan antara Barat dan Timur", "Politik Energi", pernyataan gereja lebih bersifat "seimbang" untuk memperhatikan pendapat-pendapat lain yang berpengaruh dalam masyarakat. Berhubungan dengan ketajaman suara gereja yang semakin berkurang, suara gereja dalam masalah sosial dan politik semakin sedikit didengar. Pemahaman sebagai "gereja bangsa" (Volkskirche) semakin ditinggalkan banyak orang.

Meskipun begitu, gereja-gereja tidak berhenti peduli terhadap masalah-masalah yang penting yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, dan oleh karena itu gereja-gereja



dibantu secara finansial oleh pemerintah. Pekerjaan lembaga-lembaga diakonia seperti "Diakonie" (protestan) dan "Caritas" (katolik) diperluas dalam banyak bidang sosial kemanusiaan; pekerjaan proyek-proyek di dunia ke-3 didukung dan masalah pelestarian lingkungan hidup juga mendapat perhatian. Salah satu titik berat kegiatan dan keterlibatan politik kelompok-kelompok gerejawi bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lain pada tahun 80-an adalah perjuangan melawan penempatan senjata-senjata nuklir AS/NATO di wilayah-wilayah Jerman. Doa-doa perdamaian, demonstrasi-demonstrasi damai, blokade-blokade duduk di depan fasilitas-fasilitas militer AS dan seruan penuh semangat oleh seorang protestan dan ilmuwan nuklir, C. F. von Weizsäcker, pada tahun 1985 kepada gereja-gereja sedunia untuk melaksanakan sebuah "Konsili Perdamaian Dunia" memperlihatkan keberagaman dan kreatifitas penuh fantasi dalam perlawanan nirkekerasan. Aksi-aksi protes ini menimbulkan bentrokan keras dengan kekuasaan pemerintah yang menjadi sasaran utama, a.l. karena pemerintah kurang memperhatikan bahwa senjata-senjata nuklir ini akan mengancam saudara-saudara di Jerman Timur yang terpisah dari Jerman Barat setelah pembangunan tembok 1961 oleh pemerintah sosialis-komunis Jerman Timur.

Di "Republik Demokratis Jerman" (Deutsche Demokratische Republik, DDR), yaitu negara Jerman Timur yang berdasarkan ideologi marxisme, tentu saja hubungan antara gereja dan negara berbeda. Agama dianggap sebagai "candu bangsa" (Karl Marx) yang akan mati dengan sendirinya bersama-sama gereja. Di satu pihak ada Propaganda untuk pemisahan yang tegas antara gereja dan negara, sementara dalam masalah-masalah praktis kadang-

kadang terjadi saling mencari persetujuan. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah mencoba mendesak gereja ke dalam sebuah "geto" (tempat keasingan): propaganda ateisme, kegiatan pemuda gereja dibatasi, orang Kristen disingkirkan dari universitas-universitas dan posisi-posisi kunci masyarakat, kegiatan publik gereja biasanya dipersulit, dan pada periode-periode tertentu terjadi penganiayaan yang keras. Namun justru dalam keadaan terdesak seperti ini gereja yang telah mengecil menunjukkan keberanian dan kebebasan yang luar biasa. Gereja mencari dialog kritis dengan instansi-instansi pemerintah, melaksanakan pertemuan-pertemuan gereja yang besar dan mengabdikan diri pada perdamaian dan kesatuan. Sebuah organisasi ekumenis "Junge Gemeinde" ("Jemaat Muda") mengorganisir gerakan perdamaian dengan nama "Pedang-pedang menjadi Mata Bajak"⁷ dan sidang sinode gereja protestan pada tahun 1982 tanpa takut menyatakan "penolakannya terhadap logika permusuhan dan saling mengancam" antara dunia barat dan timur. Selain itu, banyak pemikir dan aktivis oposisi mendapat dukungan di jemaat-jemaat, sehingga pada tahun 80-an mereka menjadi inisiator doa-doa perdamaian dan mempersiapkan ladang untuk reunifikasi Jerman.

Dengan demikian, gereja-gereja di Jerman Barat dan di Jerman Timur masing-masing berhadapan dengan negara dan keterlibatan politik dalam keadaan yang cukup berbeda: gereja di Jerman Timur merasakan sakitnya restriksi-restriksi, gereja di Jerman Barat hidup kurang lebih dalam "solidaritas kritis" dengan negara. Apakah mereka tahan uji dalam keadaan tersebut tergantung pada pertanyaan sejauh mana mereka mampu untuk mempertahankan kebebasan mereka dalam menyaksikan kehendak Allah dan melayani manusia. Menurut Dietrich Bonhoeffer, untuk melakukan hal itu ada tiga kemungkinan. Dalam ceramahnya "Gereja menghadapi masalah orang Yahudi" pada tahun 1933



"Orang Kristen dan umat-umat lain"

*Manusia mencari Allah dalam penderitaannya,
meminta bantuan, kebahagiaan dan makanan,
keselamatan dari penyakit, dosa dan kematian.
Semua manusia melakukannya – orang Kristen dan umat-umat lain.*

*Manusia mencari Allah dalam penderitaan-Nya,
menemukan-Nya miskin, terhina, tanpa tempat berlindung dan tanpa makanan,
melihat-Nya tertelan oleh dosa, ketidakberdayaan dan kematian.
Orang Kristen berada di sisi Allah dalam penderitaan-Nya.*

*Allah mencari manusia dalam penderitaan mereka,
mengenyangkan tubuh dan jiwa dengan roti-Nya,
mati untuk umat Kristen dan umat-umat lain di kayu salib
dan mengampuni keduanya.*

(Dietrich Bonhoeffer, Juli 1944)



Bonhoeffer telah berpendapat bahwa gereja harus (1) mengingatkan negara/pemerintah akan tanggung jawabnya; jika tugas ini tidak berhasil, gereja harus (2) peduli terhadap korban-korban politiknya, dan akhirnya (3) "jika gereja melihat bahwa negara gagal dalam fungsinya menciptakan penegakan hukum yang adil dan ketertiban umum, gereja tidak boleh hanya membalut korban-korban di bawah roda, namun harus berusaha untuk menghentikan roda itu sendiri"⁸.

Semangat yang merendah – 1990-2003

Ketika era "perang dingin" berakhir pada tahun 1989 (runtuhnya tembok antara Jerman Timur dan Barat) dan – seperti sebuah mujizat - Jerman menemukan jalan untuk reunifikasi, sepertinya gereja Protestan juga memasuki masa yang baru. Ada harapan bahwa setelah berakhirnya propaganda ateisme di bagian Timur Jerman, tempat Martin Luther pernah hidup dan berkarya, orang-orang akan mengalir dalam jumlah besar masuk kembali ke gereja dan ini akan menjadi kesempatan untuk gereja untuk ikut membentuk dan mengembangkan proses reunifikasi. Namun dengan implimentasi struktur-struktur gereja Barat dan penagihan pajak gereja melalui sistem pajak negara, gereja tidak hanya kehilangan banyak anggotanya, namun juga kehilangan pengaruh dalam kehidupan publik. Hanya satu hal yang positif yang dapat dicatat, yaitu banyak tokoh Kristen dari bagian Timur Jerman mendapat posisi-posisi penting dalam masyarakat dan politik. Namun selain itu, suasana sekularisme semakin menguat, di mana gereja hanya dinilai berdasarkan manfaatnya, ditambah dengan suasana pluralisme di mana semakin banyak aliran-aliran religius yang menyebar dalam masyarakat. Salah satu dampaknya adalah keterasingan yang semakin kuat antara gereja dan negara. Gereja tetap boleh mengeluarkan suaranya berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan etika, namun ini hanya salah satu dari banyak suara, apakah itu berhubungan dengan masalah-masalah aktual seperti politik keluarga, etika teknologi genetik, eutanasia dll.

Pada tahun 1997, gereja Protestan dan Katolik kembali mengeluarkan sebuah memorandum bersama yang melibatkan diri dalam masalah politik, yaitu tentang tema "Untuk Masa Depan penuh Solidaritas dan Keadilan". Sampai sekarang ini memorandum tersebut memberi ukuran dan pedoman yang sangat penting di tengah-tengah transisi sosial yang cukup deras. Salah satu puncak di mana gereja menggumuli perkembangan-perkembangan negara dan politik dunia adalah

Pertemuan Raya Gereja ("Kirchentag") di mana setiap dua Tahun lebih dari 100.000 orang Kristen berkumpul, merayakan dan berdiskusi bersama tema-tema aktual berhubungan dengan gereja dan masyarakat, sehingga mendapat juga banyak perhatian publik.

Publik juga menyadari bawah gereja yang berada di tempat yang paling depan dalam protes melawan perang Irak. Sudah pada bulan Oktober 2002 Ketua Dewan Gereja Protestan di Jerman (EKD), Kock, menolak dengan keras intervensi militer dengan mengingat pada kewajiban perdamaian ekumenis: "bahwa menurut kehendak Allah tidak boleh ada perang". Pernyataan ini dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi anti-perang di hampir semua kota di Jerman menguatkan posisi "Tidak" pemerintah Jerman terhadap perang Irak.

"Gereja dan Politik dalam Sejarah Jerman 1933-2003" – ternyata tema ini berubah-ubah dramatis antara dua ekstrim, yaitu penyesuaian diri dan perlawanan. Sejarah ini tidak terlalu memperlihatkan keteladanan yang meyakinkan. Meskipun itu, gereja dipanggil untuk bergumul pada setiap zaman dan pada setiap tempat supaya tidak berhutang pada dunia karena tidak memberikan kesaksian Injil, namun tanpa ragu-ragu terlibat pro-aktif dengan urusan-urusan dunia. Itu yang dirindukan Dietrich Bonhoeffer dalam gerejanya pada masa "Kerajaan Ketiga". Sekaligus Bonhoeffer mengingatkan kita untuk, dari pada membuat pidato-pidato yang hebat, berkomunikasi secara intensif dengan Allah dan berani memperjuangkan kemanusiaan. Dalam suratnya dari penjara kepada anak baptisnya pada tahun 1944: "Gereja kita yang pada tahun-tahun terakhir ini hanya memperjuangkan mempertahankan diri seolah-olah gereja eksis untuk dirinya sendiri, tidak mampu menjadi pembawa Firman yang mendamaikan dan menyelamatkan untuk manusia dan dunia ini. Oleh karena itu, formulasi-formulasi teologi lama harus menjadi tidak berdaya dan bisu, sehingga kekristenan kita dewasa ini hanya terdiri dari dua hal: berdoa dan melakukan apa yang adil di antara manusia. Semua pemikiran, pembicaraan dan pengorganisirannya dalam hal-hal kekristenan harus dilahirkan kembali dari doa dan perbuatan ini."

Catatan Kaki

1 "Deutsche Christen", DC, organisasi politik kanan yang mendukung dan melegitimasi serta dipergunakan politik Nazi Hitler; "Nazi" adalah singkatan untuk ideologi ekstrim kanan yang menyebut diri "sosialisme nasional".

2 "Kerajaan Ketiga", istilah untuk masa rezim diktator Nazi Hitler

3 "Pengakuan Dosa Stuttgart"; Stuttgart adalah kota di Jerman barat daya

4 "Bundesrepublik Deutschland", BRD, Jerman Barat sebagai wilayah yang diduduki Perancis, AS dan Inggris dalam Perang Dunia II dan sejak 1949 diberi kemerdekaan sebagai negara demokratis; berbeda dengan Jerman Timur yang diduduki oleh Rusia yang membentuk negara sosialis, "DDR", sampai pada reunifikasi 1989

5 "Evangelische Kirche in Deutschland", EKD, sinode persekutuan gereja-gereja Protestan di BRD

6 yang dulunya – sebelum kekalahan Jerman dalam perang dunia II – masih bagian dari Jerman

7 "Schwerter zu Pflugscharen", berdasar pada Mi 4/Yes 2:1-5

8 Roda disini dimaksud sebagai simbol untuk sistem politik yang menindas, artinya gereja tidak boleh hanya melakukan pelayanan karitatif terhadap korban-korban akibat sistem politik tersebut namun harus berusaha untuk merubah penyebabnya, yaitu melawan sistem politik yang tidak manusiawi.



Pdt. Eckart Rein adalah pendeta gereja Württemberg, Jerman dan aktivis gerakan perdamaian. Pada tahun 1991 - 1998 menjadi sekretaris EMS

(Evangelisches Missionswerk Südwestdeutschland) untuk Indonesia.

Bersama isterinya, Margret Rein ia menjadi jembatan dalam hubungan kemitraan ekumenis antara gereja-gereja di Indonesia bagian Timur (termasuk lembaga STT Intim Makassar) dan gereja-gereja di Jerman bagian Barat Daya.

Foto: Pdt. Rein dalam diskusi tentang rekonsiliasi di Halmahera dan Ambon, September 2002 di Makassar. Artikel di atas diterjemahkan dari Bahasa Jerman oleh Pdt. Markus Hildebrandt

Kuasa-kuasa baik

*Dikelilingi kuasa-kuasa yang baik, yang setia dan tenang,
dilindungi dan dihibur penuh keajaiban
demikian aku ingin hidup bersamamu
dan memasuki bersamamu tahun yang baru.*

*Yang lama masih ingin menyiksa hati-hati kita,
beban berat dari hari-hari yang jahat masih menekan kita.*

*Ya, Tuhan, kepada jiwa-jiwa kami yang gentar
berikan keselamatan yang Kaupersiapkan untuk kami.*

*Dan jika Engkau memberi kami cawan yang berat dan pahit itu
penuh penderitaan sampai di pinggirnya
maka kami akan mengambilnya dengan bersyukur dan tanpa gemetar
dari tanganMu yang baik dan dikasihi.*

*Namun jika Engkau masih ingin menghadiakan kami
kegembiraan akan dunia ini dan akan cahaya mata harinya,
maka kami ingin mengingat hal-hal yang sudah berlalu,
lalu hidup kami sepenuhnya akan menjadi milikMu.*

*Lilin-lilin yang Engkau bawa ke dalam kegelapan kami
biarkan menyala dengan hangat dan tenang.*

*Jika mungkin, kumpulkan kami kembali untuk bersatu.
Kami tahu, terangmu bersinar di malam yang gelap.*

*Jika kesunyian yang mendalam akan menjalar di sekeliling kami,
maka biarkan kami mendengar bunyi yang sempurna itu
dari dunia yang tak nyata yang mengelilingi kami,
madah pujian semua anak-anakMu.*

*Dilindungi kuasa-kuasa yang baik, yang setia dan tenang,
dengan penuh kepercayaan kami menanti apapun yang terjadi
Allah bersama kita pada waktu malam dan pada pagi hari
dan tentu saja di setiap hari yang baru.*



Dietrich Bonhoeffer dalam kamp konsentrasi, Desember 1944
(penerjemahan Markus Hildebrandt Rambe)